

KETIMPANGAN JENDER DALAM PARTISIPASI EKONOMI: ANALISIS DATA SAKERNAS 1980 - 2013

(*GENDER INEQUALITY IN ECONOMIC PARTICIPATION: SAKERNAS DATA ANALYSIS 1980 – 2013*)

Deshinta Vibriyanti

Peneliti Ketenagakerjaan Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Nayla_dv@yahoo.co.id

Abstrak

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi merupakan daya dorong yang potensial bagi peningkatan perekonomian. Perempuan terbukti memiliki kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan rumah tangga. Tulisan ini mendeskripsikan perkembangan ketenagakerjaan perempuan dalam pasar tenaga kerja di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari data Sakernas tahun 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2013 per bulan Februari. Studi ini menggarisbawahi terjadinya transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian pada dekade 1980an menuju tahun 1990 yang kemudian berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan secara umum. Perubahan ekonomi dan sosial budaya yang berkembang sejak tahun 1990an hingga kini membawa pengaruh pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), lapangan pekerjaan utama, status dan jenis pekerjaan angkatan kerja perempuan. Selain itu tenaga kerja perempuan juga masih menghadapi tantangan kultural dan struktural yang cenderung memarjinalkan posisi perempuan di pasar kerja. Tenaga kerja perempuan seringkali menghadapi ketidakadilan dan diskriminasi di pasar kerja salah satunya terkait dengan upah. Data Sakernas menunjukkan rata-rata upah yang diterima buruh/karyawan perempuan lebih rendah 30 persen dibandingkan dengan buruh/karyawan laki-laki. Sekitar 60 persen angkatan kerja perempuan cenderung tidak tersentuh oleh undang-undang perlindungan tenaga kerja karena mereka bekerja pada sektor informal. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman bagi tenaga kerja perempuan guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.

Kata Kunci: Angkatan Kerja Perempuan, TPAK, Lapangan Pekerjaan, Status Pekerjaan, Jenis Pekerjaan, Upah.

Abstract

The involvement of women in economic activities is a potential driving force for the economic development. Women proved to have a significant contribution in the increasing of household income. This paper describes the development of the employment of women in the labor market in Indonesia by using secondary data from Sakernas year 1980, 1990, 2000, 2010 and 2013 per month of February. This study has highlighted the transformation of labor from the agriculture sector to the non-agriculture sector in the 1980s to the 1990s that subsequently affects the employment conditions in general. The changes in the economic and socio-cultural that have progressed since the 1990s until now have an impact on the Labor Force Participation Level (TPAK), the main employment, the status and type of the employment for women labor force. Aside from that, women labors still face cultural and structural challenges that tend to marginalize the position of women in the labor market. Female labors often have to deal with injustice and discrimination in the labor market, one of which related to wages. Sakernas data shows that the average wage received by female labors/employees is 30 percent lower than the male labors/employees. Moreover, approximately 60 percent of women in the labor force are not shielded by the Law of Labor Protection because they work in the informal sector. Hence the need for the government's attention to create a work environment that is fair and safe for female labors in order to increase the women's participation in the economic activities.

Key Words: Women Labor Force, TPAK, Employment, Status of The Employment, Type of The Employment, Wage.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2000, Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi deklarasi Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs) yang terdiri dari delapan butir kesepakatan. Negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menargetkan bahwa pada tahun 2015 akan mengalami peningkatan kesejahteraan pada masyarakatnya melalui program pencapaian MDGs. Salah satu isi dari butir kesepakatan tersebut yang berkaitan dengan kesetaraan gender terdapat pada butir ke tiga yaitu "Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan". Kemudian pemerintah berusaha menjabarkan butir-butir kesepakatan menjadi target-target yang lebih praktis dan operasional. Target yang hendak dicapai adalah menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan tahun 2005 dan disemua jenjang sebelum tahun 2015. Kemudian target tersebut diukur melalui beberapa indikator yaitu: (1) Rasio anak perempuan di sekolah dasar; (2) Rasio anak perempuan di Sekolah Menengah Pertama; (3) Rasio anak perempuan di Sekolah Menengah Atas; (4) Rasio anak perempuan di Perguruan Tinggi; (5) Rasio melek huruf perempuan usia 15-24 tahun; (6) Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan pada sektor non-pertanian; dan (7) Proporsi perempuan di kursi DPR.

Dalam laporan pencapaian MDGs tahun 2012, Indonesia memastikan bahwa berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan. Pada bidang pendidikan, pada tahun 2011 rasio perempuan terhadap laki-laki di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut-turut sebesar 98,80 dan 103,45, sedangkan pada tingkat sekolah menengah atas sebesar 97,82. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pun pada kelompok usia 15-24 tahun telah mencapai 99,95. Sedangkan pada bidang ketenagakerjaan, terlihat adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian dari 29,24 persen pada tahun 1990 meningkat menjadi sebesar 36,67 persen pada tahun 2011. Disamping itu, proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di lembaga terhormat DPR juga mengalami peningkatan menjadi 18,4 persen. Dapat dikatakan bahwa pemerintah merasa sudah berada pada jalur yang tepat (*on track*) menuju pencapaian kesetaraan gender tahun 2015 dengan status capaian dalam kategori 1 yaitu 'sudah tercapai'. Namun sejatinya angka-angka tersebut perlu dicermati secara kritis karena tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang terjadi di tengah masyarakat.

Dibalik angka-angka capaian agregat yang dilaporkan oleh pemerintah tersebut, masih menyisakan pekerjaan rumah yang butuh jalan keluar antara lain kesenjangan antar daerah. Terbukti masih sekitar 60 persen atau 20 propinsi lagi yang memiliki kontribusi perempuan pada sektor non-pertanian lebih rendah dari rata-rata nasional. Propinsi yang memiliki kontribusi perempuan pada sektor non-pertanian terendah diantaranya: Kalimantan Timur (26,50%), Papua Barat (28,41%) dan Papua (29,67%). Di bidang pendidikan, rasio anak perempuan yang bersekolah dibandingkan dengan anak laki-laki menunjukkan pencapaiannya yang lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian sumbangan perempuan dalam kerja berupah di sektor non-pertanian yang hanya mencapai 36,67 persen. Hal tersebut mencerminkan suatu kondisi ketenagakerjaan yang masih jauh dari kesetaraan. Ditambah lagi capaian indikator proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPR yang rendah menjadi bukti bahwa perempuan dan laki-laki belum berada dalam posisi seimbang secara ekonomi, politik dan budaya.

Peran perempuan dalam pasar kerja semakin lama semakin diperhitungkan. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dalam banyak studi terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan itu sendiri dan meningkatkan perekonomian keluarganya. Bahkan pada saat ini tidak jarang ditemui perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mariun (2004) mengenai kontribusi perempuan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin membuktikan bahwa perempuan berkontribusi cukup signifikan yaitu sebesar 40 persen dari total pendapatan rumah tangga. Dalam hal ini kontribusi perempuan dapat disebut sebagai katup pengaman atau penopang bagi rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Namun sejalan dengan itu, Widodo (2004) melakukan sebuah studi mengenai pembagian kerja dan sumbangan pendapatan kaum perempuan pada keluarga miskin yang mengambil kasus di kota Cilegon, membuktikan bahwa kaum perempuan pada rumah tangga miskin mempunyai bobot pekerjaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan bekerja mengurus rumah tangga dan membantu mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Studi ini juga membuktikan bahwa perempuan cenderung memperoleh pendapatan rata-rata lebih rendah dari laki-laki walaupun mempunyai pendidikan, umur, status kawin, lapangan usaha dan jenis pekerjaan yang sama.

“Dari satu juta penduduk, tiga perlimanya adalah wanita dan anak perempuan. Wanita diberbagai tempat identik dengan upah yang rendah karena mereka terkonsentrasi pada jenis-jenis pekerjaan dengan upah rendah dan bahkan untuk jenis pekerjaan yang sama tidak jarang perempuan mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun pada kenyataannya wanita menghabiskan sekitar 70% dari waktu yang tidak dibayar untuk merawat keluarga, kontribusi mereka terhadap ekonomi global hampir tidak terlihat”
(*Taking Gender Equality Seriously, UN Development Programme, 2006*).

Berdasarkan temuan-temuan di atas maka tulisan ini berusaha menganalisa bagaimana perkembangan tenaga kerja perempuan di Indonesia dilihat dari partisipasi di pasar kerja, lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan, jenis pekerjaan serta bentuk-bentuk perlindungan bagi angkatan kerja perempuan melalui perundang-undangan. Analisis dalam tulisan ini menggunakan sumber data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)¹. Tulisan ini menggunakan data per sepuluh tahun (dasawarsa) yang dimulai dari tahun 1980 hingga tahun 2010. Kemudian dengan tujuan analisa kondisi ketenagakerjaan angkatan kerja perempuan terkini, maka tulisan ini juga menambahkan data-data Sakernas di tahun 2013 per bulan Februari.

SEJARAH PERGERAKAN PEREMPUAN DALAM EKONOMI

Masuknya perempuan dalam kegiatan ekonomi sebenarnya telah terjadi sejak jaman dulu. Bahkan di Eropa dan Amerika jauh sebelum revolusi industri terjadi perempuan telah bekerja di sektor pertanian baik sebagai pekerja keluarga maupun sebagai buruh, bahkan beberapa di pertambangan. Terjadinya revolusi industri kemudian membuka peluang kesempatan kerja bagi perempuan untuk masuk di sektor industri. Pada umumnya industri-industri yang berkembang pada masa itu seperti industri pemintalan, tekstil, logam dan produk-produk rumah tangga lainnya. Kesempatan kerja pada masa itu untuk perempuan (termasuk anak-anak) cukup besar mengingat tenaga kerja perempuan menawarkan

¹ Sakernas merupakan salah satu survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi salah satu acuan sumber data ketenagakerjaan di Indonesia. Survei dasar (*base line survey*) dilakukan pada tahun 1976 dan kemudian disusul Sakernas 1977 dan 1978

fleksibilitas, upah yang rendah dan mampu beradaptasi di tempat kerja yang berupah rendah. Selain itu perempuan memiliki *feminine skill* yang diasosiasikan sesuai dengan beberapa jenis pekerjaan di industri makanan, tekstil, perangkat makanan (pecah belah) dan pakaian jadi. Namun kondisi tenaga kerja perempuan pada saat itu sangat memprihatinkan. Jam kerja yang panjang dengan waktu istirahat yang pendek, ditambah lagi makanan yang sedikit dan tempat kerja yang penuh sesak oleh pekerja menjadikan kondisi kerja pada masa itu jauh dari kata nyaman dan sehat. Selain jumlah upah yang dibayarkan pada perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, tenaga kerja perempuan juga menerima potongan upah yang besar jika mereka datang terlambat atau bekerja dengan lambat. Biasanya mereka mulai bekerja pukul 5 atau 6 pagi kemudian hanya diberikan waktu 30 menit kurang untuk makan siang serta sedikit waktu atau bahkan tidak diberikan kesempatan untuk makan malam. Banyak tenaga kerja perempuan yang lemah dan jatuh sakit bahkan berakibat pada kematian karena kurangnya asupan makanan selama mereka bekerja.

Kondisi yang tidak kurang menyedihkannya juga terjadi di kota-kota miskin di Eropa dimana tidak terdapat pabrik-pabrik yang membuka kesempatan kerja bagi perempuan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup banyak perempuan yang terpaksa berprofesi sebagai penjaja seks komersial. Profesi ini dinilai cepat menghasilkan uang tanpa harus menunggu upah dalam hitungan minggu atau bulan. Selain itu bekerja sebagai pembantu rumah tangga juga menjadi pilihan kaum perempuan. Namun pekerjaan ini juga tidak luput dari kekerasan dan pelecehan seksual. Kondisi ini juga berakibat meningkatnya penyakit-penyakit seksual pada masa itu.

Berbagai-gerakan feminis yang tumbuh di masyarakat Eropa dan Amerika mulai membawa angin segar dan membuka mata dunia untuk memperhatikan nasib perempuan di pasar kerja. Pada pertengahan kedua dari abad 19 terjadi dua hal perubahan yang sangat signifikan pada kondisi ketenagakerjaan perempuan. Pertama, perkembangan jenis-jenis pekerjaan bagi perempuan semakin beragam. Seiring dengan mulai meningkatnya tingkat pendidikan perempuan dan membaiknya perekonomian dunia mendorong tenaga kerja perempuan masuk ke bidang-bidang pekerjaan seperti guru, perawat, kasir, pelayan toko, sekretaris, operator telepon dan lain sebagainya. Kedua, mulai menurunnya tingkat perkawinan bagi perempuan di usia kerja. Akibat dari terbukanya akses terhadap pendidikan bagi kaum perempuan, berimplikasi terhadap penundaan usia perkawinan dini.

Di Indonesia sendiri peran perempuan dalam perekonomian dan pembangunan terus berkembang. Dari abad ke 16 dimana kekuasaan Belanda melalui VOC selama kurang lebih tiga setengah abad di tanah air secara tidak langsung turut membuka kesempatan kerja perempuan bekerja sebagai buruh tani seperti di perkebunan teh, kopi, karet, tembakau dan juga dipertambangan. Walaupun pada saat itu kondisi tenaga kerja perempuan di tanah air jauh dari kata layak. Namun sejalan dengan waktu muncul gerakan-gerakan politik yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Salah satu organisasi perempuan pertama yang lahir di Indonesia adalah Poetri Mardika yang berdiri atas bantuan Boedi Oetomo. Diikuti oleh bersatunya gerakan perempuan Indonesia dalam Kongres Perempuan I yang diadakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres ini melahirkan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) yang mengagendakan pendidikan untuk kaum perempuan, nasib yatim piatu dan janda, perkawinan anak-anak, reformasi undang-undang perkawinan, pentingnya meningkatkan harga diri perempuan, dan kejahatan kawin paksa. Selanjutnya pada kongres ke II PPPI pada tahun 1930 isu yang diangkat adalah perdagangan perempuan, hak suara perempuan, wacana perlu didirikannya kantor Penerangan Tenaga Kerja untuk Perempuan, dan penelitian sanitasi di desa serta tingginya angka kematian bayi. Jika diperhatikan isu-isu yang dimunculkan masih relevan dengan situasi perempuan saat ini. Hal tersebut merefleksikan kondisi perempuan yang masih termarginalkan, tidak setara dan diskriminasi masih berlangsung hingga kini di tanah air.

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan politik tanah air, kondisi perempuan khususnya dalam bidang ketenagakerjaan mulai membaik. Jika sebelumnya perempuan ditempatkan di ruang domestik saat ini perempuan telah masuk ke ruang publik dan terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi dan politik. Hal tersebut ditunjukkan oleh proporsi angkatan kerja perempuan yang terus meningkat. Salah satu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif terlibat secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja².

² Dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) sendiri mengalami berbagai perubahan konsep variabel yang ditanyakan. Definisi usia kerja pada survei sebelum

Secara keseluruhan, tenaga kerja perempuan di Indonesia menurut hasil survei Sakernas tahun 1980 mencapai sekitar 32,65 persen dari seluruh angkatan kerja yang bekerja secara aktif. Sedangkan pada tahun 1990 tenaga kerja perempuan yang aktif menjadi 44,04 persen (Lihat Tabel 1). Dengan demikian, terdapat kenaikan pertumbuhan tenaga kerja wanita selama periode tahun 1980 – 1990 sekitar 11,39 persen. Kenaikan ini secara umum disebabkan oleh terjadinya transformasi pasar kerja yang ditandai dengan pergerakan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian bagi perempuan menjadi salah satu faktor pendorong masuknya perempuan ke sektor industri dan jasa. Sebelum teknologi pertanian berkembang, tenaga kerja wanita masih banyak dimanfaatkan mulai dari proses menanam sampai proses pemanenan hasil pertanian. Namun setelah masuknya revolusi hijau dalam pertanian yang menggantikan tenaga-tenaga perempuan dengan teknologi mesin, maka peran perempuan dalam pasar kerja khususnya di sektor pertanian menjadi menurun dan berpindah ke sektor non pertanian. Menurut Horn (1975) dalam Bukit dan Bakir (1983) mekanisasi sektor pertanian di perdesaan yang menggunakan mesin penggilingan padi telah menggantikan penumbukan padi dengan tangan yang dilakukan oleh kaum perempuan di desa. Hal tersebut telah menghilangkan kesempatan kerja bagi ribuan buruh tani perempuan di berbagai daerah di pulau Jawa. Kemudian sistem tebasan yang menggantikan pola penuaian padi secara tradisional ikut mendorong buruh tani perempuan untuk mencari peruntungan di sektor lain.

Mayling Oey (1985) menyebutkan bahwa salah satu penyebab meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan adalah tekanan ekonomi yang sulit. Menurut Mayling Oey, TPAK perempuan berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan. Rumah tangga di perdesaan yang menggantungkan hidup dari pertanian menghadapi tekanan ekonomi yang sulit akibat menyempitnya lahan pertanian dan meningkatnya kesempatan kerja di sektor jasa dan industri. Hal tersebut mendorong perempuan masuk ke pasar kerja di sektor non-pertanian sebagai upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga. Khususnya pada sektor jasa, kelompok perempuan lebih mudah masuk dan

tahun 2000 adalah penduduk berusia 10 tahun ke atas, kemudian sejak tahun 2000 hingga kini definisi tersebut berubah, usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun.

berkembang karena sektor ini lebih fleksibel, artinya selain untuk menambah pendapatan rumah tangga, peran sebagai ibu rumah tangga masih dapat dilakukan (Soesilo, 1997).

Menurut Sinha (1965), perkembangan partisipasi tenaga kerja perempuan terhadap pembangunan akan mengikuti pola yang berbentuk huruf “U. Pada tahap pertama pembangunan, lapangan kerja di sektor pertanian akan menurun dan bergeser pada sektor lain seperti industri dan jasa. Hal ini akan mengurangi kesempatan kerja dan meningkatkan pengangguran bagi angkatan kerja perempuan. Kemudian setelah pembangunan mencapai suatu tahap tertentu dimana kondisi pendidikan dan perekonomian menjadi lebih baik akan mendorong perempuan untuk kembali masuk ke pasar kerja. Hal ini lah yang menyebabkan TPAK perempuan menjadi meningkat.

Tabel 1: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Tahun	Perempuan	Laki-laki
1980*	32,65	68,42
1990*	44,04	70,92
2000**	51,69	84,17
2010**	52,50	83,33
2013**	52,36	85,12

Keterangan: *) penduduk berumur 10 tahun atau lebih

***) penduduk berumur 15 tahun atau lebih

Sumber: Data Sakernas 1980, 1990, 2000, 2010, 2013 per bulan Februari

Memasuki tahun 2000 TPAK perempuan semakin membaik dengan laju pertumbuhan 7,65 persen. Namun jika dicermati kembali, sejak tahun 2000 hingga kini TPAK perempuan peningkatannya cenderung rendah, bahkan menurun sekitar 0,14 persen di tahun 2013. Kondisi ini perlu dicermati guna menganalisis penyebabnya dan menemukan akar permasalahannya. Stagnasi partisipasi perempuan pada saat ini dapat dilihat dari aspek ekonomi dan sosial budaya. Dari aspek ekonomi mengacu pada pernyataan yang diungkapkan Meyling Oey (1985) bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan berbanding lurus dengan kemiskinan, sehingga menurunnya partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai indikasi mulai membaiknya perekonomian keluarga. Perempuan tidak perlu lagi masuk pasar kerja karena tingginya upah yang diterima oleh laki-laki sebagai kepala keluarga dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun asumsi ini perlu didukung oleh penelitian lebih lanjut, karena adanya pengaruh tingkat inflasi menjadikan upah riil

yang diterima tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.

Kemungkinan lain adalah diduga karena seiring meningkatnya pendidikan kaum perempuan terjadi pergeseran nilai di tengah masyarakat terkait peran perempuan. Banyak pasangan muda saat ini – umumnya dengan tingkat pendidikan yang tinggi-mulai memiliki pandangan dan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak. Mereka mulai menyadari bahwa anak-anak mereka membutuhkan peran ibu yang sangat besar di usia keemasan (sekitar 0-8 tahun), karena pada masa tersebut anak akan mengalami tingkat perkembangan yang sangat drastis seperti perkembangan kognitif, emosi, motorik, fisik dan sosial yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kualitas hidup anak di masa depan. Pada masa keemasan ini anak akan sangat peka dan sensitif terhadap berbagai rangsangan dan pengaruh dari luar (psikologi perkembangan anak). Di tengah arus informasi dan globalisasi yang mengalir kuat, kembali memposisikan perempuan di ranah domestik menjadi salah satu pilihan bagi keluarga untuk “melindungi” anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan. Kondisi inilah yang kemudian menghambat masuknya perempuan masuk ke pasar kerja.

Selanjutnya kemungkinan lain yang menjadi penyebab stagnannya partisipasi perempuan di pasar kerja adalah berkaitan dengan menurunnya keberhasilan program Keluarga Berencana. Beberapa dekade terdahulu pada masa dimana program Keluarga Berencana sangat sukses menurunkan angka kelahiran, jumlah anak yang sedikit berdampak pada menurunnya waktu perempuan yang tersita untuk mengurus anak dan rumah tangga sehingga memungkinkan perempuan untuk masuk ke pasar kerja. Menurut Bongart (1999), ketika TFR tinggi maka partisipasi perempuan dalam pasar kerja relatif rendah. Sebaliknya apabila TFR cenderung rendah maka partisipasi perempuan di pasar kerja akan meningkat. Dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan bahwa *Total Fertility Rate* (TFR) yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya 2,6 per perempuan usia subur. Rata-rata TFR 2012 masih sama dengan 2007 dan gagal mencapai target 2,4 pada tahun ini. Dengan TFR 2,6, maka rata-rata pasangan usia subur di Indonesia rata-rata masih memiliki 3 hingga 4 orang anak. Kondisi demikian nantinya akan menghambat perempuan untuk bekerja karena besarnya alokasi waktu yang dibutuhkan untuk mengurus anak dan rumah tangga. Ditambah lagi gagalnya menurunkan *unmeet* sesuai target berarti masih banyak pasangan

usia subur yang belum mendapatkan pelayanan KB dan semakin meningkatkan kemungkinan rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh rumah tangga.

Walaupun secara umum partisipasi angkatan kerja perempuan memiliki kecenderungan naik tapi angka tersebut masih jauh berada di bawah partisipasi angkatan kerja laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih menemui hambatan untuk masuk ke pasar kerja dibanding dengan laki-laki. Sistem budaya yang terbentuk dalam masyarakat mempengaruhi cara pandang dan kedudukan perempuan sebagai tenaga kerja. Perempuan yang bekerja dianggap hanya untuk membantu mencari nafkah sehingga apabila dalam suatu kondisi suami-istri sama-sama bekerja, para istri biasanya lebih sering keluar dari pasar kerja apabila dihadapkan pada kondisi pembatasan. Masih banyak ditemui perusahaan yang memilih untuk tidak mempekerjakan tenaga kerja perempuan dikarenakan enggan membayar upah saat tenaga kerja perempuan tersebut cuti hamil dan melahirkan. Dalam hal tunjangan, perempuan yang telah menikah dan mempunyai anak sering diperlakukan sebagai pekerja lajang sehingga tidak berhak memperoleh tunjangan keluarga. Tidak jarang pula terjadi pemutusan hubungan kerja bagi perempuan yang disebabkan karena perempuan tersebut sedang dalam kondisi hamil. Kesempatan untuk berkembang dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, konferensi, seminar-seminar lebih terbuka kepada laki-laki karena alasan domestik yang menjadi penghalang bagi perempuan untuk melakukan perjalanan dinas. Ditambah lagi berbagai kasus tindak kejahatan dan pelecehan seksual yang terjadi menambah daftar kondisi marginalnya perempuan di tempat kerja.

Namun jika berbicara mengenai angka partisipasi dari hasil survei, cara perhitungan angka partisipasi juga perlu dicermati. Dalam menghitung angka partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, reliabilitas data di sebagian besar negara berkembang telah lama menjadi perdebatan. Hal ini diduga karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perempuan cenderung berada pada batas antara yang bernilai ekonomis dan non-ekonomis, dibandingkan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan laki-laki. Jika suatu kondisi menguntungkan secara ekonomi, perempuan juga kemungkinan besar akan bekerja secara paruh waktu (*part-time*) atau bekerja secara musiman (Kandiyoti, 1990). Berkaitan dengan data partisipasi angkatan kerja wanita tersebut, definisi mengenai bekerja yang diterapkan pada kegiatan survei dan sensus di Indonesia juga mempengaruhi besaran angkatan kerja wanita di Indonesia (Jones, 1981).

Keputusan untuk bekerja atau tidak, dapat dikatakan bias gender karena keputusan tersebut cenderung untuk laki-laki, dimana pengertian bekerja berada dalam konteks moneter dan ruang publik saja, bukan dalam konteks alokasi waktu. Bila dilihat dari analisis jam kerja tidak terlepas dari kerja produktif dan non produktif. Berbagai analisis ketenagakerjaan saat ini hanya menengahkan kerja produktif yaitu kerja yang menghasilkan uang. Misalnya definisi BPS (Badan Pusat Statistik) memandang kriteria bekerja hanya untuk mereka yang mencari uang atau untuk mencari penghasilan (Widodo, 2004). Sebaliknya perempuan nyaris tidak memiliki waktu santai karena tanggung jawab domestik yang melekat namun bernilai rendah secara moneter. Padahal dalam analisis ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan isu gender, persoalan pekerjaan tidak hanya kerja produktif tetapi menyangkut kerja non-produktif. Moore dalam Supeli (1999) menyatakan bahwa segala hal yang dikerjakan oleh individu adalah baik untuk memenuhi kebutuhan subsisten, dipertukarkan atau diperdagangkan, menjaga kelangsungan keturunan dan kelangsungan hidup keluarga dan masyarakat. Dari definisi tersebut ditegaskan bahwa kerja tidak hanya menyangkut berbagai hal yang langsung berhubungan dengan penghasilan. Pekerjaan domestik rumah tangga termasuk tugas melanjutkan keturunan tercakup dalam definisi tersebut.

Jika melihat kondisi ekonomi ketenagakerjaan berdasarkan wilayah (desa-kota) terlihat bahwa TPAK di perdesaan secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Pada tahun 2010 TPAK perdesaan sebesar 70,21 dan TPAK perkotaan sebesar 64,82. Artinya kesempatan kerja di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Hal tersebut terbukti juga dengan TPAK wanita di desa lebih tinggi daripada di kota. Rendahnya partisipasi wanita dalam angkatan kerja di kota tidak hanya disebabkan oleh masih terbatasnya lapangan kerja di sektor non-pertanian bagi wanita, tetapi juga karena sifat dan pekerjaan di kota yang umumnya mengharuskan wanita meninggalkan rumah. Hal ini menimbulkan konflik antara tugas wanita sebagai istri dan ibu rumah tangga disatu pihak, dan tugasnya sebagai seorang pekerja di pihak lain. Di pedesaan kebanyakan wanita bekerja di pertanian keluarga dan tidak perlu bekerja di luar lingkungan keluarga atau dalam lingkungan yang asing bagi suami mereka. Tugas rumah tangga juga dapat dilakukan bersama-sama dengan pekerjaan mereka (Bukit dan Bakir, 1983). Perempuan di desa banyak melakukan kegiatan ekonomi dan produktif walaupun penghasilannya tidak sebesar di perkotaan. Selain itu jenis pekerjaan yang mayoritas di sektor informal memiliki jam kerja yang fleksibel sehingga tidak perlu meninggalkan

tugas domestik. Berbeda dengan karakteristik perempuan perkotaan yang rata-rata tergolong kelas menengah dengan pendidikan yang lebih baik memiliki kecenderungan untuk tidak masuk ke sektor publik. Selain disebabkan kesempatan kerja di sektor formal yang lebih kompetitif, pekerjaan di sektor formal juga kurang fleksibel bagi perempuan yang telah berkeluarga.

Kemungkinan lain rendahnya TPAK di perkotaan disebabkan oleh besarnya angka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tingkat ekonomi yang lebih baik serta pengaruh lingkungan perkotaan yang lebih modern menyebabkan anak-anak perempuan di perkotaan memilih untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dari pada masuk ke pasar kerja. Sebaliknya, di perdesaan ditemui kecenderungan anak-anak lulusan SMA memutuskan untuk masuk ke pasar kerja dari pada melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang relatif berbiaya mahal. Pengaruh lingkungan dan kondisi keluarga yang kurang mampu “memaksa” perempuan untuk bekerja membantu perekonomian keluarga atau bahkan memutuskan untuk menikah.

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA

Pembagian penduduk yang bekerja dan perkembangannya dari masa ke masa menurut sektor sering dianalisa dengan membedakan menurut sektor tiga sektor pokok sektor A (pertanian), sektor M (industri) dan sektor S (perdagangan dan jasa) (Manning, 1990). Lapangan kerja utama pada studi ini secara umum di bagi menjadi tiga sektor yaitu: 1) Pertanian (Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan), 2) Industri (Pertambangan, Industri,

besar. Hal tersebut ditunjukkan dengan 55,9 persen dari seluruh angkatan bekerja di sektor pertanian, sisanya bekerja di sektor industri dan sektor lainnya. Namun meskipun nampaknya sebagian besar penduduk yang bekerja terserap di sektor pertanian pada negara-negara agraris namun persentase dari produk nasional (GDP) yang disumbangkan sektor ini masih relatif kecil. Hal ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa tingkat produktivitas sektor pertanian relatif rendah dibanding sektor lain. Pada tahun 1980an sumbangan sektor pertanian terhadap GDP paling rendah dibandingkan dengan sektor lain yaitu 30 persen, sementara sektor industri 33 persen dan sektor jasa 37 persen. Proporsi angkatan kerja yang dapat diserap di sektor industri pada tahap permulaan pembangunan di Indonesia masih relatif kecil. Mungkin hal ini agak sedikit bertentangan dengan teori-teori ekonomi yang menggarisbawahi perpindahan angkatan kerja dari pertanian ke industri. Kondisi ini menjelaskan bahwa tenaga kerja yang pindah dari sektor pertanian tidak memperoleh pekerjaan di sektor manufaktur dan kemudian terserap di sektor perdagangan dan jasa (Manning, 1990). Hal ini juga mencerminkan bahwa penduduk yang menggantungkan hidup di sektor pertanian banyak yang berada pada kantong kemiskinan.

Pada tahun 1990 pekerja di sektor pertanian menurun menjadi 49,9 persen, sedangkan di sektor industri dan jasa meningkat menjadi 50,1 persen. Menurut beberapa teori ekonomi, pembangunan biasanya disertai dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Keberhasilan strategi pembangunan sering dikaitkan dengan kecepatan pertumbuhan sektor industri yang dianggap berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas angkatan kerja (Manning, 1990).

Tabel 2: Persentase Angkatan Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utamadan Jenis Kelamin, 2012-2013

Lapangan Pekerjaan Utama	Perempuan					Laki-Laki				
	1980	1990	2000	2010	2013	1980	1990	2000	2010	2013
Pertanian	53,78	56,25	21,26	39,18	34,28	56,98	55,63	16,76	40,31	35,52
Industri	12,38	12,37	29,84	14,40	14,91	7,46	14,60	39,37	20,20	24,14
Jasa	33,84	31,38	48,90	46,42	50,81	35,56	29,77	43,87	39,49	40,34
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data Sakernas 1980, 1990, 2000, 2010, 2013 per Februari

Listrik, gas dan air, Bangunan) dan 3) Jasa (Perdagangan, Transportasi, Keuangan, Jasa Kemasyarakatan). Struktur lapangan pekerjaan tahun 1980an ditandai dengan bergesernya tenaga kerja sektor produksi pertanian ke sektor produksi non pertanian dan jasa dengan muatan teknologi yang lebih

Dari data Sakernas belum terlihat pergerakan angkatan perempuan ke sektor non-pertanian di tahun 1980 menuju tahun 1990. Hal ini ditandai dengan masih tingginya persentase angkatan perempuan yang bekerja di sektor pertanian, sementara di sektor jasa cenderung menurun. Namun di tahun 2000 terjadi

penurunan jumlah angkatan kerja perempuan di sektor pertanian menjadi 21,26 persen, kemudian diikuti oleh peningkatan angkatan kerja di sektor industri sebesar 29,84 persen dan sektor jasa 48,90 persen. Jika dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki, pergeseran angkatan kerja antar sektor telah terjadi tahun 1980an menuju tahun 1990. Angkatan kerja sektor pertanian mulai berkurang dan diiringi meningkatnya angkatan kerja di sektor industri. Namun sektor jasa mengalami pengurangan angkatan kerja laki-laki sebanyak 5,8 % dari tahun 1980.

Menurut Todaro dalam Hakim (2011), terjadinya mobilitas tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat upah di kedua sektor tersebut sektor pertanian mulai ditinggalkan oleh angkatan kerja antara lain karena sektor pertanian dinilai tidak dapat mendatangkan penghasilan dalam waktu singkat, membutuh modal yang relatif besar, tingkat resiko gagal panen yang tinggi, dan tingkat upah sektor non-pertanian yang lebih tinggi menjadi faktor penarik terjadinya mobilitas tenaga kerja. Memasuki tahun 2000 kondisi penyerapan tenaga kerja baik angkatan kerja laki-laki maupun perempuan menurut sektor relatif sama. Sektor jasa menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak sekitar 48 persen untuk angkatan kerja perempuan dan 43 persen untuk angkatan kerja laki-laki. Kemudian diikuti oleh sektor industri dan yang terakhir adalah sektor pertanian. Selanjutnya, sepanjang kurun waktu 2000-2010 terjadi perubahan dalam struktur ketenagakerjaan per sektor. Pada tahun 2010 sektor pertanian kembali menguat dengan menjadi penyerap tenaga kerja kedua terbesar setelah sektor jasa. Sedangkan sektor industri menjadi sektor penyerap tenaga kerja terendah baik bagi angkatan kerja laki-laki maupun angkatan kerja perempuan. Pada dasarnya kondisi perekonomian dalam negeri tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian global. Sekitar tahun 2007-2008, perekonomian dunia mengalami krisis yang menyebabkan melemahnya sektor industri dunia. Hal tersebut juga membawa dampak pada kondisi perekonomian dalam negeri. Melemahnya sektor industri mengakibatkan aliran tenaga kerja kembali masuk ke sektor pertanian. Karakteristik sektor pertanian yang cenderung bersifat informal dan tidak membutuhkan spesifikasi pendidikan dan keahlian yang tinggi, membuat sektor ini mampu menjadi penyelamat dalam menghadapi krisis ekonomi. Selain itu kebijakan pemerintah yang mulai memperhatikan masalah-masalah pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional juga turut mendorong memajukan sektor pertanian.

Kemudian dari data Sakernas terbaru tahun 2013 per Februari menunjukkan penurunan jumlah angkatan kerja di sektor pertanian. Pada tahun ini, membaiknya perekonomian dunia ditandai dengan menguatnya sektor industri dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Khususnya bagi angkatan kerja perempuan, peningkatan angkatan kerja di sektor jasa menjadi penguat bahwa sektor ini mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik tenaga kerja perempuan. Namun terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dalam menganalisa perkembangan tenaga kerja menurut sektor. Alokasi penduduk yang bekerja menurut sektor ini dapat dipengaruhi oleh waktu sensus dan referensi waktu yang dipakai dalam sensus. Hal ini terutama disebabkan oleh fluktuasi musiman dalam penyerapan tenaga kerja disektor pertanian, terutama naiknya pada masa penggarapan tanah dan panen kemudian menurun pada masa lain (terutama turun pada musim *panceklik*) (Manning, 1990). Berapa ahli ekonomi ketenagakerjaan mengkritisi kelemahan dalam pertanyaan mengenai lapangan dan jenis pekerjaan, terutama di daerah perdesaan di negara sedang berkembang dimana belum banyak terjadi spesialisasi pekerjaan. Selain itu karakteristik pekerjaan di sektor pertanian yang bersifat musiman, jam kerja yang terbatas, serta mobilitas antar sektor yang tinggi membuat proses pendataan sering menuai kritikan.

STATUS PEKERJAAN UTAMA

Pergeseran struktur dan peningkatan mutu angkatan kerja, bukan saja terjadi dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, tetapi juga dari sektor informal ke sektor formal. Pekerja di sektor informal menurun dari sebesar 69,9 persen pada tahun 1980 menjadi 63,6 persen pada tahun 1990. Pekerja informal terdiri atas pengusaha yang berusaha tanpa buruh, pekerja yang berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap, dan pekerja keluarga. Di pihak lain pekerja di sektor formal, yaitu pekerja yang berusaha dengan buruh tetap dan buruh atau karyawan meningkat dari 30,1 persen pada tahun 1980 menjadi 36,4 persen pada tahun 1990. Pengaruh kondisi perekonomian global yang sedang mengalami krisis berdampak pada perekonomian dalam negeri khususnya sektor formal. Pada negara-negara dengan tingkat pertumbuhan pendudukan dan urbanisasi yang tinggi seperti Indonesia, ekonomi informal justru menjadi penyelamat dalam krisis ekonomi karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Berdasarkan data Sakernas per Februari 2013, dari 114,02 juta orang yang bekerja, sebanyak 53,48 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal. (60,98 juta orang). Jika ditinjau berdasarkan perbedaan jenis kelamin, sektor formal masih

didominasi oleh angkatan kerja laki-laki, yang pada Februari 2013 persentasenya mencapai 64,59 persen (hampir dua pertiga bagian). Sementara itu menyoroti angkatan kerja perempuan, dari total 43,81 juta orang yang bekerja terdapat orang 57,14 persen yang bekerja pada sektor informal sedangkan sisanya 42,86 persen di sektor formal. Faktanya tidak sedikit juga perempuan di perkotaan yang tadinya bekerja di sektor formal kemudian berpindah ke sektor informal. Sektor ini dinilai lebih memiliki fleksibilitas terhadap waktu dan tempat, sehingga perempuan masih dapat mengurus rumah tangga dan juga membantu menambah penghasilan keluarga. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan tenaga kerja perempuan yang berusaha dengan buruh tetap tumbuh relatif cepat khususnya di lapangan pekerjaan perdagangan. Sistem perdagangan secara online melalui media internet mendorong peningkatan jumlah pengusaha perempuan saat ini. Produk-produk kerajinan tangan, makanan, sandang, aksesoris dan lain sebagainya yang diproduksi oleh kaum perempuan dapat dengan mudah dipasarkan secara online tanpa harus bertatap muka dengan konsumen. Transaksi semacam ini dinilai lebih menguntungkan karena dapat menekan biaya sewa tempat untuk menjual produk. Selain itu juga berpeluang membuka kesempatan kerja bagi angkatan kerja lainnya.

Namun kondisi itu juga terjadi pada angkatan kerja laki-laki. Sedangkan pada angkatan kerja laki-laki didominasi oleh angkatan kerja yang berstatus buruh atau karyawan. Hal ini mencerminkan efek dari mobilitas tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa.

Selanjutnya perubahan yang signifikan terjadi pada angkatan kerja perempuan pada tahun 1990. Dari tahun 1980 menuju tahun 1990, semua jumlah angkatan kerja perempuan menurun di setiap status pekerjaan, kecuali meningkat pada status bekerja sebagai pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga. Peningkatan pada status kerja ini cukup signifikan yaitu sekitar 18 persen dari 29,57% menjadi 47,73% di tahun 1990. Ditemukan suatu gejala bahwa perempuan di daerah perdesaan harus bekerja membantu suami di pertanian dikarenakan rendahnya tingkat pendapatan keluarga di sektor ini, sehingga angkatan kerja perempuan banyak yang berstatus menjadi pekerja keluarga tidak dibayar. Kondisi ini didukung oleh data Sensus Penduduk tahun 1980 yang menunjukkan bahwa TPAK angkatan kerja perempuan di perdesaan lebih tinggi (35,17) dibandingkan dengan TPAK perempuan di perkotaan (24,18). Hal ini disebabkan karena perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah di perdesaan relatif

Tabel 3: Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin

No.	Status pekerjaan	Perempuan					Laki-Laki				
		1980 ¹⁾	1990	2000	2010	2013	1980 ¹⁾	1990	2000	2010	2013
1.	Bekerja Sendiri	21,56	16,60	18,30	17,74	16,58	27,47	21,64	23,64	19,87	16,91
2.	Berusaha dengan ART/ BuruhTdk Tetap	23,86	12,82	13,09	13,43	11,16	27,20	30,51	28,98	24,80	20,64
3.	Berusaha dengan Buruh Tetap	1,09	0,34	1,26	1,33	1,79	2,70	1,06	2,91	3,74	4,62
4.	Buruh/Karyawan	23,26	22,51	28,34	25,96	33,55	30,64	31,13	35,94	30,27	38,26
5.	Pekerja Bebas Pertanian ²⁾	-	-	-	5,70	4,09	-	-	-	6,01	4,57
6.	Pekerja Bebas Non-Pertanian ²⁾	-	-	-	2,24	2,11	-	-	-	6,60	7,83
7.	Pekerja Tidak dibayar	29,57	47,73	39,02	33,60	30,72	12,10	15,66	8,53	8,72	7,16
	Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Ket: ¹⁾ perhitungan usia kerja dimulai dari usia 10 tahun, ²⁾ baru mulai ditanyakan pada survei tahun 2005

Sumber: SP 1980, Sakernas 1990, 2000, 2005, 2010, 2013

Tabel 3 menunjukkan status pekerjaan utama angkatan kerja laki-laki dan perempuan. Pada tahun 1980 terlihat bahwa komposisi jumlah angkatan kerja perempuan hampir merata di setiap status pekerjaan kecuali pada status berusaha dengan buruh tetap.

memiliki kesempatan kerja yang lebih luas dibandingkan dengan di perkotaan. Biasanya angkatan kerja di perdesaan bersedia bekerja apa saja, sedangkan di daerah perkotaan cenderung memilih pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Memasuki tahun 2000 perubahan kembali terjadi pada komposisi angkatan kerja perempuan berdasarkan status pekerjaan³. Persentase angkatan kerja perempuan di setiap status pekerjaan meningkat seiring dengan menurunnya persentase status sebagai pekerja keluarga tak dibayar. Jumlah angkatan kerja perempuan yang berstatus sebagai buruh/karyawan meningkat hingga hampir 6% di tahun 2000. Pertumbuhan pekerjaan yang pesat di daerah perkotaan diindikasikan dengan adanya pergerakan tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal.

Perubahan ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dalam dan luar negeri. Krisis ekonomi dunia yang terjadi pada tahun 2008 membawa dampak langsung pada sektor formal sehingga terjadi penurunan angkatan kerja perempuan yang berstatus sebagai buruh dan karyawan di tahun 2010. Selain itu pada survei Sakernas tahun 2005, ditambahkannya dua status baru dalam struktur pekerjaan utama yaitu pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non-pertanian berpengaruh terhadap besaran komposisi di masing-masing status pekerjaan. Mulai tahun 2010 kelompok angkatan kerja terbesar mulai berubah dari kelompok status pekerja keluarga tidak dibayar menjadi kelompok status bekerja sebagai buruh atau karyawan. Jumlah angkatan kerja yang berstatus buruh atau karyawan meningkat sekitar 7,6 persen dari 25,96 persen di tahun 2010 menjadi 33,55 persen. Hal ini merupakan dampak dari usaha pemerintah untuk terus menumbuhkan kesempatan kerja di sektor formal.

Data di atas menunjukkan bahwa persentase *unpaid worker* bagi perempuan masih sangat tinggi dibandingkan dengan laki-laki yaitu berkisar 30 persen dari total angkatan kerja perempuan sedangkan pada angkatan kerja laki-laki hanya sekitar 7 persen di tahun 2013. Kondisi ini sejalan dengan pembahasan dalam teori ekonomi mikro bahwa kegiatan yang tidak berhubungan dengan pasar kerja dipandang rendah biaya dan dikesampingkan karena diperoleh dari sumber-sumber yang tidak bernilai moneter. Karakteristik perempuan yang diasosiasikan terbatas pada ruang domestik menjadikan tenaga kerja perempuan dinilai tidak melakukan kegiatan produksi. Tenaga kerja perempuan yang bekerja membantu

³ Terjadi perubahan konsep tentang status pekerjaan pada tahun 2001 dari 5 kategori menjadi 7 kategori, yaitu: 1) Berusaha sendiri; 2) Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar; 3) Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar; 4) Buruh/karyawan/pegawai; 5) Pekerja bebas di pertanian; 6) Pekerja bebas di non pertanian; 7) Pekerja tak dibayar.

suami atau anggota rumah tangga lainnya dalam bekerja atau berusaha (bertani, berdagang dan lain sebagainya) tidak diukur secara moneter. Perempuan hanya dianggap sebagai membantu mencari nafkah walaupun tidak jarang ditemukan penghasilan istri lebih banyak memenuhi kebutuhan keluarga. Pola pikir masyarakat sosial masih mengkondisikan ketergantungan perempuan terhadap laki-laki.

Kondisi tenaga kerja perempuan lebih cenderung terlibat pada kegiatan-kegiatan yang berada pada batas antara yang bernilai ekonomis dan non ekonomis dibandingkan dengan kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh laki-laki. Jika suatu kondisi menguntungkan secara ekonomi, perempuan kemungkinan akan bekerja secara paruh waktu (*part-time*) atau bekerja secara musiman (Blumberg, 1989). Dari kenyataan tersebut tidak mengherankan bila status sebagai pekerja tidak dibayar banyak dijumpai pada kelompok tenaga kerja perempuan.

JENIS PEKERJAAN UTAMA

Pembagian kerja secara seksual tidak hanya dikotomi bidang domestik dan publik saja, tetapi dalam bidang publik pun terjadi segmentasi yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada segmen yang berbeda (Abdullah, 1995). Karena keterbatasan data, maka tulisan ini hanya menampilkan data Sakernas mengenai jenis pekerjaan yang dimulai dari tahun 2001. Beberapa penyesuaian dilakukan berkaitan sistem klasifikasi internasional terutama menyangkut jenis pekerjaan atau klasifikasi jabatan karena beberapa pekerjaan yang tercantum dalam klasifikasi Internasional tidak cocok dengan jenis pekerjaan yang ada di Indonesia.

Dari tahun 2001 hingga saat ini jenis pekerjaan sebagai tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan masih merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh angkatan kerja baik laki-laki maupun perempuan. Namun dalam perkembangannya, jenis pekerjaan sebagai tenaga usaha pertanian ini selalu mengalami penurunan hingga saat ini. Bagi angkatan kerja perempuan, berkurangnya angkatan kerja yang berprofesi sebagai tenaga usaha pertanian diiringi dengan meningkatnya jumlah pekerja di jenis pekerjaan lainnya. Pekerjaan sebagai tenaga usaha pertanian mampu menyerap 34,10 persen angkatan kerja perempuan. Jenis pekerjaan yang kedua yang banyak dilakukan oleh tenaga kerja perempuan adalah sebagai tenaga usaha penjualan dan periklanan, pada tahun 2013 sebanyak 26,17 persen. Diikuti oleh jenis pekerjaan sebagai tenaga produksi operator, alat-alat angkatan dan

pekerja kasar menduduki urutan ketiga yaitu sebanyak 16,73 persen.

Jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan angkatan kerja laki-laki maka terdapat kesamaan tiga besar jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh angkatan kerja perempuan. Hanya saja pada urutan yang berbeda yaitu tenaga usaha pertanian (34,78 persen), tenaga produksi operator, alat-alat angkutan dan pekerja kasar (33,66 persen) dan urutan ketiga yang banyak digeluti oleh angkatan kerja laki-laki adalah tenaga usaha penjualan, dan periklanan sebanyak 14,02 persen. Hal yang menarik dari data tabel di bawah menunjukkan jenis pekerjaan 1 (tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya) lebih banyak dikerjakan oleh tenaga kerja perempuan (9,63%), sedangkan angkatan kerja laki-laki pada jenis pekerjaan ini hanya sebanyak 5,30%. Hal ini merupakan dampak dari meningkatnya tingkat pendidikan perempuan sehingga jenis pekerjaan ini banyak dilakukan oleh perempuan. Begitu juga dengan jenis pekerjaan sebagai tenaga usaha jasa juga

lebih banyak dilakukan oleh tenaga kerja perempuan. Namun untuk jenis pekerjaan sebagai tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan masih lebih banyak dilakukan oleh laki-laki.

Perbedaan jenis pekerjaan pada dasarnya tidak terlepas dari pengaruh akar sosial budaya tradisional. Perempuan diasosiasikan sebagai suatu kelompok yang memiliki karakteristik feminim yang menyebabkan terjadinya proses identifikasi pekerjaan-pekerjaan publik yang sesuai dengan sifat wanita. Hal ini dapat terlihat dari jenis-jenis pekerjaan yang digeluti oleh tenaga kerja perempuan antara lain dibidang jasa seperti sekretaris, pelayan, pembantu rumah tangga, resepsionis, tukang urut dan lain sebagainya. Laki-laki biasanya lebih banyak memilih pekerjaan yang banyak menggunakan otot sementara perempuan lebih banyak memilih pekerjaan yang berkaitan dengan kecermatan, ketelatenan dan kehati-hatian. Di sektor pertanian misalnya, pekerjaan mengolah tanah (mencangkul, menggaru, meratakan tanah) dilakukan oleh laki-laki, sementara pekerjaan menanam, membersihkan rumput dan memanen adalah pekerjaan perempuan.

Tabel 4: Persentase Angkatan Kerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin

Jenis Pekerjaan Utama	Perempuan			Laki-Laki		
	2001	2010	2013	2001	2010	2013
0/1	4,50	6,77	9,63	2,96	4,54	5,30
2	0,12	0,40	0,44	0,34	1,13	1,32
3	4,08	4,95	5,81	5,05	4,09	5,34
4	23,90	25,46	26,17	14,06	14,03	14,02
5	6,24	7,21	7,07	4,06	5,00	4,84
6	44,46	38,94	34,10	43,10	39,64	34,78
7/8/9	16,66	16,20	16,74	29,79	30,73	33,66
xx/0	0,04	0,05	0,05	0,67	0,83	0,75
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

- *0/1. Tenaga Profesional, teknisi dan yang sejenis,
- 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan,
- 3. Tenaga Tata Usaha dan yang sejenis,
- 4. Tenaga Usaha Penjualan, dan periklanan
- 5. Tenaga Usaha jasa
- 6. Tenaga usaha pertanian , kehutanan, perburuan dan perikanan
- 7/8/9. Tenaga produksi operator, alat-alat angkutan dan pekerja kasar,
- xx/0. Lainnya

Sumber: Data Sakernas tahun 2001, 2010, 2013

Kecenderungan sosial yang mengorientasikan laki-laki ke ranah publik sementara perempuan ke ranah domestik telah memproduksi ketimpangan dalam penguasaan akses-akses kehidupan, salah satunya adalah pendidikan. Pandangan-pandangan yang terbentuk di masyarakat sosial adalah tempat laki-laki adalah dipasar kerja oleh karena itu membutuhkan pendidikan yang lebih baik, sedangkan tempat perempuan adalah di rumah karena itu tidak membutuhkan pendidikan yang lebih baik. Kalaupun perempuan harus masuk ke pasar kerja, rendahnya pendidikan secara otomatis akan mengarahkan perempuan pada jenis-jenis pekerjaan kasar yang berupah rendah.

Secara teoritis, pendidikan bagi wanita akan meningkatkan penawaran dan permintaan terhadap tenaga kerja mereka. Status pendidikan penduduk yang bekerja dapat menunjukkan syarat-syarat kerja serta keterampilan yang dibutuhkan pada sektor dan jenis pekerjaan tertentu. Menurut Boserup (1970) yang dikutip oleh Bukit dan Bakir, pendidikan akan memperbaiki status, kemampuan dan keahlian seorang wanita. Hal ini meningkatkan kemampuan bersaing dan meningkatkan permintaan terhadap jasa jasanya di pasar tenaga kerja. Di samping itu, pendidikan juga meningkatkan aspirasi dan harapan seorang wanita tentang penghasilan dan kehidupan yang lebih baik, dan hal ini lebih mendorongnya untuk masuk angkatan kerja.

Secara umum dapat terlihat peningkatan pendidikan angkatan kerja baik laki-laki maupun perempuan selama dekade 1980-2013 cukup signifikan. Ini terbukti dari persentase angkatan kerja yang tidak/belum pernah sekolah dan yang tidak/belum tamat SD mengalami penurunan yang drastis dari tahun 1980 hingga kini. Jika dianalisa berdasarkan ilmu ekonomi, peningkatan TPAK perempuan disebabkan oleh sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Dari sisi penawaran, peningkatan TPAK perempuan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang semakin membaik serta penerimaan sosial yang mulai terbuka terhadap perempuan yang bekerja, khususnya perempuan yang sudah menikah. Peningkatan jumlah angkatan kerja perempuan yang pendidikan tertinggi SLTA kejuruan meningkat tajam dari tahun 1980 (2,81%) menjadi 14,87 persen di tahun 1990. Dan di tahun 2013 angkatan kerja perempuan yang berpendidikan tertinggi universitas bahkan lebih tinggi (7,85%) dari pada angkatan kerja laki-laki (6,30%).

Namun demikian, masuknya perempuan ke pasar kerja masih menemukan kendala-kendala baik secara budaya, sosial maupun politik. Perempuan masih

menemui ketidaksetaraan perlakuan di pasar kerja dibanding dengan kelompok laki-laki. Salah satunya ketidaksetaraan yang sering terjadi adalah perbedaan tingkat upah antara laki-laki dan perempuan pada kualifikasi dan jenis pekerjaan yang sama. Rata-rata tingkat upah yang diterima seorang laki-laki nikah 8 sampai 4 persen lebih besar dari rata-rata tingkat upah perempuan nikah, kadang-kadang mereka sering dianggap sebagai pekerja cadangan (Suryadarma, 2005).

Tabel 5: Rata-rata Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan Buruh/Karyawan Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Rata-Rata Upah Perbulan (Rupiah)			
	1990	2000	2010	2013
Perempuan	58.261	326.035	1.113.694	1.409.200
Laki-laki	105.066	481,308	1.458,424	1.799.845

Sumber: Dara Sakernas 1990, 2000, 2010, 2013 per Februari

Tabel 5 menunjukkan rata-rata upah/gaji bersih yang diterima buruh/karyawan menurut jenis kelamin. Studi ini tidak menampilkan data upah pada tahun 1980 karena ketidakterdapatannya data yang disebabkan oleh belum ditanyakannya variabel rata-rata upah/gaji buruh/karyawan pada survei 1980. Dari tabel di atas terlihat sejak tahun 1990 hingga kini rata-rata upah/gaji yang diterima oleh buruh/karyawan perempuan selalu lebih rendah dibandingkan dengan buruh/karyawan laki-laki. Rata-rata kesenjangan upah yang diterima tenaga kerja perempuan dan tenaga kerja laki-laki sekitar 30 persen setiap dekade. Konstruksi sosial yang menempatkan wanita pada struktur subordinat dalam berbagai kegiatan ekonomi telah menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan yang lebih baik (Abdullah, 1995). Konstruksi sosial terlebih dahulu melalui suatu proses identifikasi terhadap apa-apa yang sesuai dengan karakteristik perempuan dan kemudian tercermin pada pekerjaan-pekerjaan marjinal yang dikerjakan oleh perempuan. Proses identifikasi ini pada dasarnya merupakan proses pemaknaan eksistensi diri perempuan itu sendiri. Artinya perempuan sendiri memiliki andil yang cukup besar dalam proses interaksi dan negosiasi perannya dalam sosial. Asosiasi perempuan dengan kegiatan domestik dan *life of cycle* (daur hidup) yang dimiliki oleh perempuan yang memiliki unsur reproduksi yang lebih lama (melahirkan, menyusui, memelihara) menjadi salah satu penyebab ketimpangan-ketimpangan dalam ekonomi. Tingkat absensi perempuan yang tinggi karena peran reproduksi

seringkali dijadikan alasan untuk tidak memilih tenaga kerja wanita, atau menempatkan wanita dalam pekerjaan yang marjinal, atau memberikan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki (dalam jenis pekerjaan yang sama) atau dengan kata lain mobilitas tenaga kerja perempuan yang tinggi dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk menekan upah.

Diskriminasi dalam hal pengupahan menjadi contoh yang menarik untuk diangkat. Meskipun perempuan mengerjakan jenis pekerjaan yang sama dengan yang dikerjakan oleh laki-laki, perempuan kadang mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan yang diterima oleh laki-laki atau masalah tunjangan keluarga bagi pekerja perempuan yang tidak diperhitungkan. Diskriminasi semacam itu tidak selalu disebabkan oleh kapasitas perempuan yang terbatas (tingkat pendidikan dan keterampilan), tetapi seringkali disebabkan oleh faktor ideologi (Caraway, 1999).

Jika berbicara pada level rumah tangga, studi yang dilakukan oleh Widodo pada tahun 2004 membuktikan bahwa pendapatan perkapita rumah tangga dengan KRT (Kepala Rumah Tangga) perempuan lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga dengan KRT laki-laki. Perbedaan ini menjadi sangat logis ketika KRT laki-laki dimungkinkan untuk mendapat tambahan pendapatan dari pasangannya (istri), sedangkan KRT perempuan tidak mendapatkan tambahan pendapatan dari pasangannya karena pada umumnya KRT perempuan berstatus janda ataupun jika dibantu dengan ART lain yang bekerja, pendapatan KRT perempuan masih berada dibawah pendapatan KRT laki-laki. Perempuan cenderung memperoleh pendapatan lebih rendah dari laki-laki walaupun mempunyai pendidikan, umur, status kawin, jenis pekerjaan dan lapangan usaha yang sama. Terdapat apa yang disebut dengan *ideological discount rate*, yaitu sesuatu yang harus dibayar oleh perempuan pada saat ingin sejajar dengan laki-laki. Jadi jika seorang perempuan ingin memasuki suatu bidang pekerjaan dan ingin sejajar dengan laki-laki, ia tidak hanya harus memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki tetapi ia juga harus membayar biaya ideologis tambahan. Penampilan dan daya tarik merupakan modal penting dalam membayar biaya ideologi tersebut. (Abdullah, 1995).

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN

Dari data Sakernas tahun 2013 per Februari tercatat jumlah angkatan kerja laki-laki berjumlah 70,2 juta

jiwa dan angkatan kerja perempuan berjumlah 43,8 juta jiwa. Jumlah angkatan kerja perempuan tersebut diprediksi akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan kebutuhan hidup dengan perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku *matrealistis*. Selain tuntutan kebutuhan ekonomi, eksistensi perempuan, peningkatan pendidikan, kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi serta arus globalisasi membuat tuntutan tersebut terus berkembang. Untuk kepentingan pertumbuhan perekonomian negara diperlukan partisipasi dari seluruh unsur masyarakat, termasuk peran dan partisipasi perempuan. Untuk itu dibutuhkan jaminan perlindungan dari pemerintah agar setiap orang mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkontribusi. Salah satu cara untuk memberi kesempatan yang sama kepada perempuan adalah dengan kesetaraan gender dalam ketenagakerjaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tenaga kerja perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi gender di pasar kerja, selain upah yang lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki, seringkali juga perempuan yang menikah dianggap sebagai lajang, karena mendapat nafkah dari suami dan terkadang terkena potongan pajak, atau masa kerja yang lebih pendek karena persoalan reproduksi. Untuk itu pemerintah perlu melindungi tenaga kerja perempuan dengan kebijakan yang memberikan rasa aman terhadap tenaga kerja perempuan..

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 76, 81, 82, 83, 84, Pasal 93, Kepmenaker No. 224 tahun 2003 serta Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama perusahaan yang meliputi:

a. Perlindungan Jam Kerja

Perlindungan dalam hal kerja malam bagi pekerja wanita (pukul 23.00 sampai pukul 07.00). Hal ini diatur pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Tetapi dalam hal ini ada pengecualiannya yaitu pengusaha yang mempekerjakan wanita pada jam tersebut wajib:

1. Memberikan makanan dan minuman bergizi
2. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja
3. Menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 – 05.00.

Tetapi pengecualian ini tidak berlaku bagi pekerja perempuan yang berumur di bawah 18 tahun ataupun perempuan hamil yang berdasarkan keterangan dokter

berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya apabila bekerja antara pukul 23.00 – 07.00. Dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan yang tidak memberikan makanan dan minuman bergizi tetapi diganti dengan uang padahal ketentuannya tidak boleh diganti dengan uang.

b. Perlindungan dalam masa haid

Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur perlindungan dalam masa haid. Perlindungan terhadap pekerja wanita yang dalam masa haid tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dengan upah penuh. Dalam pelaksanaannya lebih banyak yang tidak menggunakan haknya dengan alasan tidak mendapatkan premi hadir.

c. Perlindungan Selama Cuti Hamil

Sedangkan pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah cuti hamil. Perlindungan cuti hamil bersalin selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan dengan upah penuh. Ternyata dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan yang tidak membayar upah tenaga kerja perempuan secara penuh. Bahkan banyak pekerja perempuan di pabrik yang rentan terhadap PHK dikarenakan tidak mempunyai ikatan formal dari perusahaan tempat bekerja karena alasan-alasan gender, seperti sebagai pencari nafkah tambahan, pekerja sambilan dan juga alasan faktor reproduksinya, seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.

d. Pemberian Lokasi Menyusui

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah ibu yang sedang menyusui. Pemberian kesempatan pada pekerja wanita yang anaknya masih menyusui untuk menyusui anaknya hanya efektif untuk yang lokasinya dekat dengan perusahaan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan adalah adanya kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha yang kadang menyimpang dari aturan yang berlaku, tidak adanya sanksi dari peraturan perundangan terhadap pelanggaran yang terjadi dan faktor pekerja sendiri yang tidak menggunakan haknya dengan alasan ekonomi. Namun demikian, perempuan sendiri masih belum banyak yang sadar bahwa hak-haknya dilindungi dan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perempuan.

Agar langkah ini dapat efektif maka pemerintah harus lebih giat lagi melakukan pengawasan terhadap regulasi hubungan kerja buruh/karyawan dengan perusahaan dan menyelesaikan setiap pertikaian dengan adil.

Diakui memang perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui undang-undang tersebut masih bias pada sektor formal. Padahal jumlah angkatan kerja yang bekerja di sektor informal sekitar 60 persen dari total seluruh angkatan kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor informal mampu menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dibandingkan dengan sektor formal, namun artinya tidak terjangkau atau terlindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan sebab Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia baru mencakup pekerja-pekerja di sektor formal. Jika ditinjau berdasarkan perbedaan jenis kelamin, maka sektor formal masih didominasi oleh dua pertiga bagian kelompok angkatan kerja laki-laki. Kelompok pekerja yang mayoritas tidak terlindungi adalah kelompok angkatan kerja perempuan. Padahal pada kenyataannya sektor informal merupakan garda depan penyelamat perekonomian bagi negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi seperti Indonesia ketika digempur oleh krisis ekonomi global.

KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik tenaga kerja perempuan di Indonesia saat ini ditinjau berdasarkan partisipasi (TPAK), kualitas pendidikan maupun tingkat upah masih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki. Transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian pada dekade 1980an menuju tahun 1990 berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan secara umum dan ketenagakerjaan perempuan khususnya.

Pada periode tahun 1980an menuju tahun 1990, angkatan kerja perempuan mulai berpindah dari sektor pertanian menuju sektor non-pertanian. Hal tersebut terlihat pada awal tahun 2000an jumlah tenaga kerja perempuan yang terkonsentrasi pada lapangan pekerjaan di sektor jasa meningkat tajam. Karakteristik sektor jasa yang dinilai fleksibel terhadap peran domestik perempuan membuat sektor ini banyak dilakoni oleh tenaga kerja perempuan. Status pekerjaan angkatan kerja perempuan pun mengalami perubahan. Sejak tahun 1980 hingga tahun 2010 status bekerja sebagai pekerja keluarga tidak dibayar merupakan status kerja paling banyak digeluti oleh tenaga kerja perempuan yaitu berkisar antara 30

hingga sekitar 40 persen dari total angkatan kerja perempuan. Namun semakin lama terlihat kecenderungan penurunan jumlah tenaga kerja perempuan yang berstatus pekerja tak dibayar diiringi dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang masuk ke sektor formal yaitu berstatus sebagai buruh/karyawan. Walaupun secara persentase jumlah angkatan kerja perempuan tidak dibayar masih tergolong tinggi.

Pada kenyataannya perempuan seringkali dianggap hanya sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarga walaupun terkadang pendapatan yang dihasilkan oleh perempuan lebih besar dibandingkan dengan pasangannya. Perempuan lebih mudah memasuki pasar kerja terutama pada sektor informal. Sementara laki-laki justru cenderung bekerja tidak tetap, artinya laki-laki lebih banyak bekerja pada bidang yang tidak pasti (kadang-kadang bekerja, kadang-kadang tidak). Oleh karena itu jika dilihat dari perannya maka perempuan yang bekerja secara tetap lebih memberikan makna bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Namun pada prakteknya tenaga kerja perempuan sering mengalami ketidakadilan di tempat kerja, seperti tingkat upah yang rendah, tidak mendapatkan tunjangan keluarga bagi pekerja perempuan, hubungan kerja yang tidak pasti sehingga mudah di PHK, tidak memperoleh hak cuti hamil dan melahirkan, pelecehan di tempat kerja atau diskriminasi lainnya. Masalah tenaga kerja perempuan menjadi kompleks ketika peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah guna melindungi tenaga kerja sendiri berbenturan dengan hambatan kesulitan perekonomian buruh/karyawan. Tenaga kerja perempuan menjadi 'incaran' perusahaan-perusahaan yang berorientasi keuntungan untuk menekan biaya produksi. Tenaga kerja perempuan disosiasikan sebagai tenaga kerja berupah rendah yang kemudian memungkinkan perusahaan-perusahaan bersaing dalam pasar bebas yang kompetitif. Dalam kondisi ekonomi pasar yang tarik ulur antara perusahaan dan buruh/karyawan, diharapkan pemerintah lebih aktif menjembatani hubungan kerja yang harmonis melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun tantangan ketenagakerjaan bagi kelompok perempuan belum berhenti sampai di sana. Perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah hanya menyentuh mereka yang bekerja di sektor formal saja, sedangkan 60 persen tenaga kerja perempuan bekerja disektor informal. Oleh karena itu merupakan pekerjaan yang besar buat pemerintah yaitu menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif bagi perempuan

sehingga mudah terserap ke sektor formal yang memiliki jaminan perlindungan bagi tenaga kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 1995. "Reproduksi Ketimpangan Gender: Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Ekonomi", *Prisma*, 6 Juni.
- Blumberg, Rae Lesser. 1989. *Making the Case for the Gender Variable*, Washington, DC: AID
- Bukit, D. dan Bakir, Z. 1983. Partisipasi Angkatan Kerja Indonesia: Hasil Sensus Penduduk tahun 1971-1980 dalam *Partisipasi Angkatan Kerja, Kesempatan kerja dan Pengangguran di Indonesia*. dalam Zainab Bakir dan Criss Manning (Ed). Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Caraway, Teri. 1999. "Feminisasi Sektor Manufaktur, Menuju Sebuah Pendekatan Baru", *Jurnal Perempuan*, edisi 11, Mei-Juli
- Corner, Lorraine. 1996. *Woman, Men and Economics: The Gender-differentiated Impact of Macroeconomics*, New York: UNIFEM.
- Hakim, Lukmanul. 2011. "Perkembangan Tenaga Kerja Wanita Di Sektor Informal: Hasil Analisa Dan Proxy Data Sensus Penduduk". *Among Makarti*, Vol.4 No.7, Juli
- Jones, Gavin W. 1981. "Labour force development since 1961", dalam Anne Booth dan Peter McCawley (eds), *The Indonesia economy under Suharto*. Singapore, Oxford University Press.
- Kandiyoti, Deniz. 1990. "Women and rural development policies: The changing agenda", *Development and Change* 21 (1) Januari
- Manning, Chris. 1990. "Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja Di Indonesia" *Lokakarya Analisa Data Sensus Penduduk 1980 Di Universitas Brawijaya*. Malang 22 Februari-12 Maret 1982.
- Maeyling Oey.1985. "Perubahan Pola Kerja Kaum Wanita di Indonesia selama dasawarsa 1970. Sebab dan Akibatnya". *Prisma*, Vol 10
- Mariun, Badrun. N. 2004. "Kontribusi Perempuan pada Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi kasus di 4 Kabupaten/Kota", *Warta Demografi*, No. 3
- Mason, Kareb O. 1995. *Gender and Demographic Change: What We Do Know?*, Liege: IUUSP.

- Sinha, J.N. 1965. "Dynamics of Female Partisipatiion in Economic Activity in Developing Economy". *Belgrade*. Proceedings of The World Population Conference IV.
- Soesilo, T. Danny.1986. *Karakteristik Tenaga Kerja Wanita di Sektor Jasa: Analisa Data Sensus Penduduk tahun 1971-1980*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM
- Suardiman,Siti Supartini.2001.*Perempuan Kepala Rumah Tangga*.Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Supelli, Karlina Leksono. 1999. "Upaya Memahami Kerja Perempuan", *Jurnal Perempuan*, edisi 11, Mei-Juli
- Suryadarma, Daniel, Asep Suryahadi, dan Sudarno Sumarto. 2005. "The Measurement and Trends of Unemployment in Indonesia: The Issue of Discouraged Workers". Jakarta: SMERU
- UNDP.1980. *Report of the world conference of the UN Decade for Women: Equality Development and Peace*. New York: Oxford University Press
- UNDP.2006. *Taking Gender Equality Seriously*. New York: Oxford University Press
- Widodo, Purwanto Teguh. 2004. "Pembagian Kerja dan Sumbangan Pendapatan Kaum Perempuan pada Keluarga Miskin (Studi Kasus di Kota Miskin)",*Warta Demografi*, No.4